



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KOTABARU TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KOTABARU TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Kecamatan, adalah dokumen Perencanaan Kecamatan untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan...

dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kotabaru yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Kotabaru tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.

(3) Renja Kecamatan Kotabaru tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Kecamatan Kotabaru tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

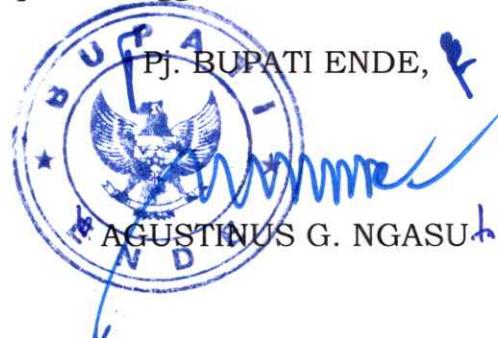
Pasal 3

Renja Kecamatan Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Kecamatan Kotabaru dalam menyusun RKA.

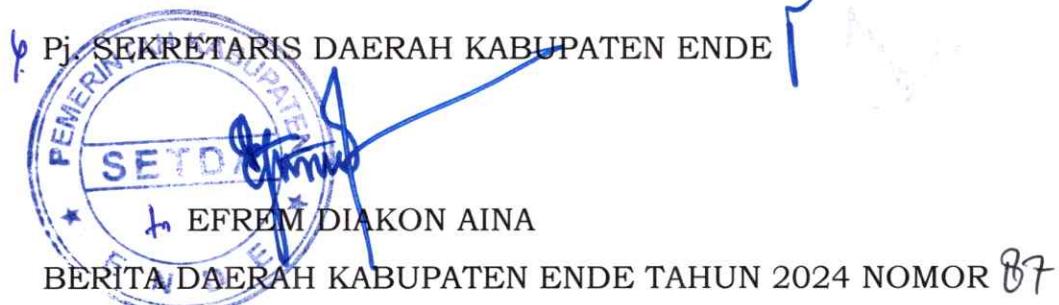
Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah rahmat dan bimbingan-Nya bagi Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 dalam upaya merangkum rangkaian program dan kegiatan hingga tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025, Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 – 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya (tahun 2023 dan 2024), masalah yang dihadapi, serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 terdiri atas Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025; Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 beserta penjelasan indikator keberhasilan program dan kegiatan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif selama penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan di Kecamatan Kotabaru untuk satu tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja ini masih belum sempurna walaupun telah dilakukan perbaikan dan perubahan. Karena itu usul, saran serta kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Kotabaru, Desember 2024

CAMAT KOTABARU

AGUSTINUS M. M. SANGGU, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19690831 200701 1 008

DAFTAR TABEL

- Tabel 01* Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kotabaru
- Tabel 02* Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2024
- Tabel 03* Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kotabaru
- Tabel 04* Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- Tabel 05* Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

``BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Kotabaru yang disusun setiap tahun anggaran dengan memprioritaskan rasionalitas terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026. Keberadaan dokumen ini merupakan suatu kewajiban absolut untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dalam mendukung tercapainya target realisasi tahunan program-program strategis pemerintah daerah Kabupaten Ende dan Program Prioritas Nasional.

Memandang betapa pentingnya dokumen Rencana Kerja, maka kualitas proses penyusunan dokumen ini perlu menjadi perhatian utama. Pada tahap awal, Tim mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Tim merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Kotabaru Tahun 2025. Pada tahap akhir, Tim menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 beserta penjelasan indikator keberhasilan program dan kegiatan yang diharapkan.

Melalui proses penyusunan dokumen Rencana Kerja seperti yang dipaparkan di atas, maka diharapkan agar prioritas program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja tersebut dapat mengakomodir kepentingan untuk pencapaian tujuan strategis : “Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”. Tercapai tidaknya tujuan tersebut dapat diukur dari tiga indikator kinerja tujuan yaitu : Capaian Opini BPK, Nilai AKIP dan Nilai LPPD. Untuk mencapai tujuan dimaksud, ada dua sasaran strategis yang harus dicapai yaitu : (1) Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi, yang dapat diukur dengan indikator : pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Kotabaru; (2) Meningkatnya

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang dapat diukur dengan indikator : Tingkat Kemandirian Desa (Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju).

Capaian terhadap target kinerja tersebut di atas dapat diukur pada saat evaluasi akhir tahun anggaran Kecamatan Kotabaru. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui sejauh mana capaian Perangkat Daerah terhadap target realisasi tahunan program-program strategis pemerintah daerah Kabupaten Ende dan Program Prioritas Nasional. Dengan demikian, tercapainya target kinerja Kecamatan Kotabaru akan berdampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026, yaitu terciptanya masyarakat Kabupaten Ende yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 sangat penting untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru dan berimplikasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 86 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor);

18. Peraturan Bupati Ende Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Kecamatan Kotabaru untuk satu tahun mendatang (tahun 2025). Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 yaitu :

1. Mewujutkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kecamatan Kotabaru berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotabaru;
2. Menjadikan Rencana Kerja sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
3. Menyelaraskan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran tahunan Kecamatan Kotabaru;
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotabaru yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan; memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun Lalu; memuat tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Perkiraan

Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025-2026, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotabaru, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kotabaru, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru, serta Program dan Kegiatan Kecamatan Kotabaru Tahun 2025.
- BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kotabaru; memuat uraian tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 beserta penjelasan indikator keberhasilan program dan kegiatan yang diharapkan yaitu : input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).
- BAB V. Penutup, memuat uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KOTABARU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan perkiraan capaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025 telah dilakukan oleh Tim dengan mengacu pada APBD Kabupaten Ende yang tertuang dalam DPA Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 dan DPA Kecamatan Kotabaru Tahun 2025. Hasil evaluasinya dapat dilihat secara detail pada tabel 02 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Sampai Dengan tahun 2025.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dipandang perlu guna mengetahui sejauh mana pencapaian dan juga kegagalan beserta penyebab yang melatarbelakangi kedua kondisi tersebut. Selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya terkait pengembangan pelayanan publik di Kecamatan Kotabaru.

Tabel 01
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN KOTABARU

URAIAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JENIS BELANJA																		JUMLAH DANA	TOTAL REALISASI								
		BELANJA OPERASI						BELANJA MODAL																					
		BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA PERALATAN DAN MESIN			BELANJA ASET TETAP LAINNYA																		
		Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi	Pagu Dana	Realisasi		Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik					
KODE	OPD KECAMATAN KOTABARU	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1																													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	995.437.795	#####	100	100	145.254.000	119.000.000	81.93	81.93	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.691.795	1.114.437.795	97,70	97,70								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.437.795	995.437.795	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.437.795	995.437.795	100,00	100,00								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	995.437.795	995.437.795	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.437.795	995.437.795	100,00	100,00								
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	739.001.300	739.001.300	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.001.300	739.001.300	100,00	100,00								
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	85.615.694	85.615.694	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.615.694	85.615.694	100,00	100,00								
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	55.729.900	55.729.900	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.729.900	55.729.900	100,00	100,00								
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.980.000	22.980.000	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.980.000	22.980.000	100,00	100,00								
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	53.613.000	53.613.000	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.613.000	53.613.000	100,00	100,00								
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/tunjangan Khusus PNS	1.284.706	1.284.706	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284.706	1.284.706	100,00	100,00								
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.067	13.067	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.067	13.067	100,00	100,00								
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	31.095.328	31.095.328	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.095.328	31.095.328	100,00	100,00								
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.526.191	1.526.191	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.526.191	1.526.191	100,00	100,00								
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.578.609	4.578.609	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.578.609	4.578.609	100,00	100,00								
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	5.768.500	5.721.100	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.768.500	5.721.100	99,18	99,18								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanor	-	-	-	-	1.925.000	1.900.100	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.925.000	1.900.100	98,71	98,71								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	-	-	-	-	984.000	983.000	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	984.000	983.000	99,90	99,90								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	641.500	638.000	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	641.500	638.000	99,45	99,45								
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00								
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-	918.000	900.000	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	918.000	900.000	98,04	98,04								
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	-	-	-	-	1.900.000	1.890.000	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.900.000	1.890.000	99,47	99,47								
5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	1.900.000	1.890.000	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.900.000	1.890.000	99,47	99,47								
7.01.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.071.600	2.071.000	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2.071.600	2.071.000	99,97	99,97								
7.01.01.2.01.0002	Penyediaan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	631.600	631.000	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	631.600	631.000	99,91	99,91								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	-	-	-	-	328.000	328.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	328.000	328.000	100,00	100,00								
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-	303.600	303.000	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	303.600	303.000	99,80	99,80								
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitasar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.440.000	1.440.000	100,00	100,00								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	1.440.000	144.000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.440.000	144.000	10,00	10,00								
7.01.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	33.218.000	25.994.400	78,25	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	33.218.000	25.994.400	78,25	78,25								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insiasi Listrik	-	-	-	-	900.000	900.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	900.000	900.000	100,00	100,00								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	108.000	108.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	108.000	108.000	100,00	100,00								
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-	-	792.000	792.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	792.000	792.000	100,00	100,00								
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-																								
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	6.048.000	6.048.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.048.000	6.048.000	100,00	100,00								
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-	6.048.000	6.048.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.048.000	6.048.000	100,00	100,00								
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	26.270.000	19.046.400	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	26.270.000	19.046.400	72,50	72,50								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	40.000	0,00	0,00	0,00									
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainya	-	-	-	-	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	800.000	0,00	0,00	0,00									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	3.780.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3.780.000	0,00	0,00	0,00									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-</td																									

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	24.980.300	21.650.000	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	24.980.300	21.650.000	86,67	86,67
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	16.110.500	15.790.000	98,01	98,01	0,00	-	0,00	-	-	-	-	16.110.500	15.790.000	98,01	98,01	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	8.841.800	5.860.000	66,28	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	8.841.800	5.860.000	66,28	66,28
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					28.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	28.000	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan	-	-	-	-	1.056.600	373.100	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.056.600	373.100	35,31	35,31
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi					982.600	373.100	37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	982.600	373100.00	37,97	37,97
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					74.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	74.000	0,00	0,00	0,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.225.000	17.325.000	95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	18.225.000	17.325.000	95,06	95,06
7.01.02.02.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait					18.225.000	17.325.000	95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	18.225.000	17.325.000	95,06	95,06
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.800.000	9.900.000	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	10.800.000	9.900.000	91,67	91,67
5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.425.000	7.425.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	7.425.000	7.425.000	100,00	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	18.914.200	7.845.000	41,48	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	18.914.200	7.845.000	41,48	41,48
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	8.060.000	7.845.000	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	8.060.000	7.845.000	97,33	97,33
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	-	-	-	8.060.000	7.845.000	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	8.060.000	7.845.000	97,33	97,33
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000	100,00	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.810.000	5.595.000	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	5.810.000	5.595.000	96,30	96,30
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	14.170.000	13.535.000	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	14.170.000	13.535.000	95,52	95,52
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	14.170.000	13.535.000	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	14.170.000	13.535.000	95,52	95,52
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	45.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	45.000	-	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	11.625.000	11.035.000	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	11.625.000	11.035.000	94,92	94,92
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
5.1.01.06.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
TOTAL		995.437.795	995.437.795	###	100,00	145.254.000	119.000.000	81,93	81,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.891.795	1.114.437.795	97,70	97,70

Dari tabel 01 di atas diketahui pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kotabaru melaksanakan 5 (Lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan. Terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai 100% dan 8 (Delapan) kegiatan lainnya dengan realisasi keuangannya berada di bawah 100%. Realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 hampir semuanya mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 100%. Hanya ada 8 (Delapan) kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan, yakni capaian target kinerja dibawah 100%.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dibutuhkan untuk menyediakan dana pembayaran koordinasi dan konsultasi penyusunan dokumen RKA – DPA SKPD selama 1 tahun untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.071.600,-. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 99.97%.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.768.500,-. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 99.18%.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.900.000,-. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 99.47%.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini diperlukan untuk menyediakan dana pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 995.437.795,-. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 100%, di mana pembayaran jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Kotabaru.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dibutuhkan untuk menyediakan dana pembayaran biaya jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 33.218.000,- dengan rincian : pembayaran komponen instalasi listrik sebesar Rp. 900.000,-, Bahan Cetak sebesar Rp. 148.000,-, Alat Listrik sebesar Rp. 792.000,-, Makan minum tamu sebesar Rp. 6.048.000,-, Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 21.650.000,-, Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 3.780.000,-, Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 800.000. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 78.25%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini dibutuhkan untuk menyediakan dana pembayaran biaya jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan, untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 23.149.800,-. Dengan rincian : Tagihan Listrik Rp. 10.562.400,-, Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp. 12.587.400,-. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 89.83%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini dibutuhkan untuk menyediakan dana pembayaran biaya pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 26.036.900,-. Dengan

rincian : Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 24.980.300,Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan sebesar Rp. 1.056.600. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 84.58 %.

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait. untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 18.225.000,-. Dengan rincian : Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 10.800.000, Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 7.425.000. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 95.06 %.

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 18.914.200,-. Dengan rincian : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 8.060.000, Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.250.000. Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 5.810.000. Pencegahan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 10.854.200 Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 41.48 %.

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.170.000,-. Dengan rincian : Bahan Cetak sebesar Rp. 45.000, Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 11.625.000. Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 2.500.000. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 95.52 %.

Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan ini dibutuhkan untuk menyediakan dana pembayaran biaya perjalanan dinas dari Kecamatan ke desa

selama 1 tahun dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.800.000,-, dan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya. Realisasi capaian target kinerja hasil/keluaran sebesar 100%, di mana kebutuhan biaya perjalanan dinas ke desa. Jadi capaian kinerja input dana sebesar 100%.

Pada Tahun Anggaran 2024 (Tahun berjalan) dialokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kotabaru sebesar Rp. 1.140.691.795,-. Terdiri atas komponen Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 995.437.795,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 145.254.614,- yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 145.254.614,-.

Capaian program dan kegiatan tahun 2024 dan capaian program dan kegiatan tahun berjalan (2025) per bulan Juni sebagaimana diuraikan di atas serta perkiraan capaian program dan kegiatan di akhir tahun 2024, berimplikasi pada capaian program Renstra Kecamatan Kotabaru sebagaimana disajikan dalam tabel 02 berikut ini:

TABEL 02
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN KOTABARU SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
KABUPATEN ENDE

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTABARU

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					Unsur Kewilayahan						
7	01				Kecamatan						
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen

						dokumen RKA-SKPD								
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporant	3 Laporan	60%
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72/78 Orang/bulan	17/12 Orang/bulan	17/12 Orang/bulan	17/12 Orang/bulan	100%	17/12 Orang/bulan	17/12 Orang/bulan	60%
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	126 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
7	01	01	2.02	0004	Kooordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan	Jumlah laporan keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	60%

					penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD								
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	54 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	57 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	36 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	60%

7	01	01	2.05	0001	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	3 Unit	60%
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	24 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	3 Orang	60%
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	3 Orang	60%
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	3 Orang	60%
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket yang disediakan peralatan rumah tangga	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	60%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	60 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	60%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	60%

7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	60%
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	36 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	60%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
7	01	01	2.06	0011	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	60%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%

						disediakan								
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	60%
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	60%
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	60%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	60%

7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	60%
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	9 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	60%
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik								
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%

					pihak swasta								
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-							
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	30 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	100%	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga kemasyarakatan	100%	2 Lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	6 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	100%	2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan	12 keluarga	4 keluarga	4 keluarga	4 keluarga	100%	4 keluarga	4 keluarga

					menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat							
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-							
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	36 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan baik							
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam	150 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang

					memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia							
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	15 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang
7	01	05	2.01	0005	Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	V12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik							
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	198 Dokumen	66 Dokumen	66 Dokumen	66 Dokumen	100%	66 Dokumen	66 Dokumen
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen

						administrasi tata pemerintahan desa								
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60 %
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%

7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangkapenyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	39 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	39 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	60%
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	39 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Kotabaru memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Untuk menganalisa dan mengukur capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotabaru, maka perlu digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende periode 2025-2026, yaitu : (1) Nilai AKIP Kecamatan Kotabaru; dan (2) Tingkat Kemandirian Desa.

Capaian kinerja pelayanan pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan Kecamatan Kotabaru Tahun 2024, capaian kinerja Tahun berjalan (Tahun 2025) dan proyeksi capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada analisis capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotabaru Tahun 2025-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 03 berikut ini.

TABEL 03
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KOTABARU
KABUPATEN ENDE

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTABARU

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
I	Berdasarkan Renstra Kec. Kotabaru Tahun 2025-2026											
1	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
II	Berdasarkan Perubahan Renstra Kec. Kotabaru Tahun 2025-2026											
1	Nilai AKIP Kecamatan Kotabaru			-	CC	B	B	-	CC	B	B	
2	Tingkat Kemandirian Desa											
	- Desa Sangat Tertinggal				0 Ds	0 Ds	0 Ds	-	0 Ds	0 Ds	0 Ds	
	- Desa Tertinggal				10 Ds	9 Ds	8 Ds	-	10 Ds	9 Ds	8 Ds	
	- Desa Berkembang				3 Ds	4 Ds	5 Ds	-	3 Ds	4 Ds	5 Ds	
	- Desa Maju				0 Ds	0 Ds	0 Ds	-	0 Ds	0 Ds	0 Ds	

Dari tabel 03 di atas diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 adalah 100%. Hal ini dilihat dari realisasi capaian 2 (dua) Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende periode 2025-2026, yaitu :

1) Persentasi kecamatan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik; Realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini ditunjukan oleh capaian 6 (Enam) sub indikator, yaitu :

- Laporan Keuangan SKPD yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu.
- LKPj, LPPD dan LAKIP yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu.
- RENJA yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu.
- Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu.
- RKA dan DPA yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 6 (enam) sub indikator tersebut antara lain : pelaksanaan penyusunan beberapa dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan selama tahun 2024.

2) Presentasi kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan baik; Realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini ditunjukan oleh capaian 4 (Empat) sub indikator, yaitu :

- Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dengan baik;
- Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan baik;

- Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan dengan baik;

- Pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dengan baik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) sub indikator tersebut antara lain : pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes di 13 desa, pelaksanaan kegiatan Pra Murenbangcam dan Musrenbangcam, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan di 13 desa terkait pelayanan umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, administrasi desa, kemasyarakatan, maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan tahun berjalan (Tahun 2025) masih di bawah 50% karena sebagian besar program dan kegiatan tahun 2024 belum terlaksana. Jika semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara maksimal, maka proyeksi capaian kinerja pelayanan sesuai target Renstra mencapai 300% pada tahun 2024 dan sebesar 400% pada tahun 2025.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kotabaru

Pemerintah Kecamatan Kotabaru, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende tergolong dalam Kecamatan Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan tertuang dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati Ende tersebut Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tersebut di atas, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari gambaran di atas semestinya disadari bahwa Kecamatan wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kotabaru dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar. Namun secara teknis masih terdapat beberapa persoalan yang harus diatasi antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sebagai pemerintah yang berada di wilayah kecamatan maka pemerintah kecamatan merupakan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan dengan berbagai variasi urusan yang memang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam penanganannya. Oleh karena itu dibutuhkanlah berbagai kebijakan yang harus jalankan di mana kebijakan-kebijakan tersebut tidak terdapat dalam program anggaran maka tentu akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan lain yang termuat dalam program kegiatan pemerintah kecamatan. Dampak yang paling dirasakan adalah dari segi pendanaan, karena itu dana yang dialokasikan kepada Kecamatan harus ditingkatkan guna mengatasi masalah-masalah yang tidak terduga demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dibutuhkan sarana prasarana yang layak dan nyaman kerja. Namun lingkungan Kecamatan Kotabaru saat ini mengindikasikan adanya ketidaknyamanan aparatur dalam bekerja karena masyarakat umum secara bebas

berlalulintas di sekitar lingkungan kantor. Selain itu juga terdapat hewan peliharaan masyarakat yang masuk berkeliaran di halaman kantor. Berhadapan dengan permasalahan tersebut maka sangat dibutuhkan adanya penataan kembali lingkungan kantor dengan membangun pagar pengaman kantor. Selain itu pada bidang pelayanan umum tidak terlaksana secara maksimal karena adanya permasalahan kerusakan perangkat E-KTP, ketiadaan perangkat komputer, dan lemari arsib. Dengan demikian diharapkan untuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pada Kecamatan Kotabaru sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pelayanan masyarakat.

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkanlah SDM aparatur kecamatan yang kompeten, karena itu dilaksanakan diklat-diklat dan bimtek-bimtek ke luar daerah. Akan tetapi yang sering terjadi adalah aparatur yang mengikuti bimtek dan diklat merupakan aparatur yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak akan memberikan dampak bagi peningkatan SDM aparatur kecamatan. Melihat hal tersebut di atas maka segala bentuk diklat dan bimtek perlu dilaksanakan secara bergantian antar aparat sehingga adanya keseimbangan dalam peningkatan SDM dan terwujudnya optimalisasi SDM aparatur Kecamatan Kotabaru.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Untuk sistem pengawasan selama ini belum semuanya terarah dengan baik, hal ini disebabkan karena program kegiatan yang masuk di wilayah kecamatan sering kali tidak dilaporkan kepada Kecamatan maupun kepada Pemerintah Desa. Karena itu Kecamatan Kotabaru berencana melakukan sistem pengawasan yang rutin dan koordinasi lintas sektor / pelaksana program dengan demikian dapat diketahui

perkembangan program kegiatan pembangunan yang masuk di wilayah Kecamatan Kotabaru.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Kecamatan Kotabaru untuk Tahun 2025 masih tetap sama, sesuai dengan rancangan awal RKPD. Secara detail dapat dilihat pada tabel 04 berikut.

TABEL 06

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Tahun Periode 2024 sd 2026

Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.16.0000
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kotabaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	170.000.000,00	100 Persen	7.500.000,00	100 Persen	8.250.000,00	100 Persen	Kecamatan Kotabaru	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	147.000.000,00	100 Persen	31.000.000,00	100 Persen	34.100.000,00	100 Persen	Kecamatan Kotabaru	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	55.200.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	22.000.000,00	100 Persen	Kecamatan Kotabaru	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	43.000.000,00	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	16.500.000,00	100 Persen	Kecamatan Kotabaru	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	95.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	27.500.000,00	100 Persen	Kecamatan Kotabaru	

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kotabaru Tahun 2025. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang telah dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangcam dan diteruskan dalam forum Musrenbang Kabupaten Ende.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024. Selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam Tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2025. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuh Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam kontek Pembangunan Nasional, Kecamatan sebagai Unsur Kewilayahan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan menjabarkan

Prioritas Nasional ke-7, yaitu : memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Prioritas tersebut memiliki sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks pengaruh dan peran indonesia di Dunia Internasional;
- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
- Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kecamatan adalah : Program Reformasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik. Program prioritas daerah tersebut kemudian telah dijabarkan 3 (Tiga) Program Kerja yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2024, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

Pelaksanaan ketiga program tersebut di atas diharapkan dapat menjawab 2 (dua) indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Nilai AKIP Kecamatan Kotabaru
2. Tingkat Kemandirian Desa

Untuk mencapai target kinerja pelayanan yang lebih maksimal, maka ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 antara lain :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- b. Mengoptimisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- c. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor (Forkompimcam), yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Instansi lainnya yang ada di Kecamatan, dan peran serta komponen pembangunan (Tiga Batu Tungku), yaitu para pemangku kepentingan antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.
- d. Mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan menurut asas otonomi daerah dalam menjalin kerja sama pembangunan

antar desa/kelurahan dan penentuan skala prioritas pembangunan di tingkat kecamatan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga;
- 2) Pendekatan top down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
- 4) Pendekatan bottom up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- 5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Berikut beberapa Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kotabaru untuk dilaksanakan pada Tahun 2024, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dijabarkan dalam 8 (Delapan) kegiatan, yaitu :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dijabarkan dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Program dan kegiatan prioritas tersebut harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai keluaran (output) dan hasil (outcome) program dan kegiatan dimaksud. Dengan demikian tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 – 2026 dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.

Kecamatan Kotabaru sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, diberikan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dengan 2 (dua) indikator pelayanan yaitu : Nilai AKIP Kecamatan Kotabaru; dan Tingkat Kemandirian Desa. Untuk mencapai target kinerja dari kedua indikator tersebut, maka disediakan input berupa kebutuhan pendanaan/pendanaan indikatif Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 sebesar Rp. 1.359.381.575,- yang terdiri dari :

1. Pendanaan indikatif kegiatan rutin sebesar Rp. 1.094.981.575,-. Pagu pendanaan indikatif tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan administrasi yang dijabarkan dalam 6 program, 16 kegiatan. Target indikator pelayanan yang mau dicapai adalah Nilai AKIP Kecamatan Kotabaru.
2. Pendanaan indikatif kegiatan top-down sebesar Rp. 264.400.000,- . Pagu pendanaan indikatif tersebut digunakan untuk membiayai 6 program, 16 kegiatan. Target indikator pelayanan yang mau dicapai adalah tingkat kemandirian desa.

Dengan tersedianya pendanaan indikatif tersebut, maka Kecamatan Kotabaru pada tahun 2024 dapat mencapai target indikator program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pencapaian

target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD II, tetapi juga didukung oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBD I, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun pendanaan Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 hanya bersumber dari APBD II Kabupaten Ende Tahun 2024. Rincian mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 06 berikut.

TABEL 04
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTABARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS										
											NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		KECAMATAN KOTABARU						1.623.490.844,00									1.785.810.940,00				
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.621.060.844,00									1.783.137.940,00				
7.01		KECAMATAN						1.621.060.844,00									1.783.137.940,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.662.137.940,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100 Persen		-		18.360.000,00		-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	20.196.000,00	KECAMATAN KOTABARU		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			2 Dokumen	3.310.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5 Dokumen	3.641.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.310.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	3.641.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.430.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.673.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.435.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.678.500,00	KECAMATAN KOTABARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	-	1 Laporan	3.310.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	3.641.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	1 Laporan	3.565.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	3.921.500,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	-	-	1.376.701.764,00	-	-	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	1.514.371.940,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dari Tunjangan ASN	17/14 Orang/bulan	-	-	17/14 Orang/bulan	1.304.101.764,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	17/14 Orang/bulan	1.434.511.940,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	27.170.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4 Dokumen	29.887.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	19.030.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4 Dokumen	20.933.000,00	KECAMATAN KOTABARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			4 Laporan	9.900.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4 Laporan	10.890.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12 Laporan			12 Laporan	9.680.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	10.648.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	6.820.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	7.502.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	17.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	19.220.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.320.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.522.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.820.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	7.502.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJAOPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.300.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	3.630.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2.200.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	2.420.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	2.860.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	3.146.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen		-	7.500.000,00				-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	8.250.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
7.01.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
7.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang			1 Orang	3.500.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Orang	3.850.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang			1 Orang	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Orang	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang			1 Orang	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Orang	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen		-	31.000.000,00				-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Person	34.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	3.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Paket	3.300.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	4.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Paket	4.400.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	4.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Paket	4.400.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Paket	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Paket	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	3.300.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen			-	20.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	22.000.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	11.000.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaraana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaraana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen			-	14.999.180,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	16.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			2 Laporan	500.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Laporan	550.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	3.999.180,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	4.400.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Perlatalan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatalan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	10.450.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen		-	24.999.900,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Person	27.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	2.200.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	17.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	18.700.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	1.999.900,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	2.200.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	2.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	2.200.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	2.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Unit	2.200.000,00	KECAMATAN KOTABARU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 Persen			100 Persen	50.000.000,00						100 Persen	55.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen			100 Persen 100 Persen	25.000.000,00						100 Persen	27.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			30 Laporan	25.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	27.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Percentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100 Persen			100 Persen	25.000.000,00						100 Persen	27.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen			12 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	13.750.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit			12 Unit	12.500.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	13.750.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	15.000.000,00						-	16.500.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 Persen			-	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	11.000.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga K emasyarakat			5 Lembaga K emasyarakat	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5 Lembaga K emasyarakat	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	100 Persen			-	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga K emasyarakat			5 Lembaga K emasyarakat	2.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Lembaga K emasyarakat	2.200.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga K emasyarakat			2 Lembaga K emasyarakat	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Lembaga K emasyarakat	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	15.000.000,00						-	16.500.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 Persen			-	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	11.000.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAHAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPOIAHAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPOIAHAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 Persen		-	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	15.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	-	16.500.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 Persen		-	15.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	16.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang		1 Orang	5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Orang	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Jumlah Laporan Konflik yang Dilengani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan			1 Laporan		5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU				
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen		5.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU				
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-		15.000.000,00						-	16.500.000,00					
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 Persen		-		15.000.000,00		-	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	16.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU				
7.01.06.2.01.0018		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	50 Laporan		30 Laporan		15.000.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	50 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN KOTABARU				
X		NON URUSAN						2.430.000,00							2.673.000,00					
XXX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.430.000,00							2.673.000,00					
I.	XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-		2.430.000,00						-	2.673.000,00					
XXX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen		-		2.430.000,00		-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 Persen	2.673.000,00	KECAMATAN KOTABARU					
XXX.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.430.000,00	Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Pengembangan Pelayanan Publik dan Investasi		1 Dokumen	2.673.000,00	KECAMATAN KOTABARU		
		J U M L A H						1.623.490.844,00							1.785.810.940,00		

BAB. V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi kecamatan tersebut, maka aparatur Kecamatan Kotabaru perlu menyusun dokumen Rencana Strategis untuk periode 2 (dua) tahun dan dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru tercatat 3 (tiga) hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yakni :

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan tenaga pegawai di Kecamatan Kotabaru belum memadai, di mana ada beberapa jabatan struktural yang belum ada pejabatnya. Kondisi ini menjadi semakin sulit karena aparatur yang ada belum mengikuti bimtek dan pelatihan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan dimaksud sehingga kebijakan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara baik dan tepat waktu dapat terwujud.

Dari segi pendanaan, alokasi dana untuk kecamatan harus ditingkatkan guna mengatasi berbagai permasalahan krusia dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain ketersediaan dana, perlu juga diperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan kerja di mana sampai saat ini Kecamatan Kotabaru belum dibangun pagar pengaman kantor. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya penataan kembali lingkungan kantor dengan membangun pagar pengaman kantor.

Berikut pada bidang pelayanan umum, kegiatan pelayanan tidak terlaksana secara maksimal karena adanya permasalahan kerusakan perangkat E-KTP dan tidak tersedianya perangkat

komputer yang siap pakai. Sedangkan di bidang pengarsipan tidak tertata dengan baik karena tidak tersedia lemari arsip yang aman untuk menyimpan dan menjaga keselamatan berkas-berkas administrasi.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotabaru, maka diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur Kecamatan Kotabaru secara efektif dan efisien. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ende Tahun 2024 dan harus disinkronkan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 serta RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran bagi aparatur Kecamatan Kotabaru. Oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru sudah semestinya dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kotabaru pada akhir Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian tingkat kinerja aparatur Kecamatan Kotabaru untuk satu tahun anggaran dapat diukur secara baik dan dapat dijadikan acuan dalam kebijakan perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut OPD

Kecamatan Kotabaru pada Tahun 2025 mendatang merencanakan dan menetapkan 6 program, 19 kegiatan yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan indikatif yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kotabaru yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kotabaru Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Oleh Karena itu Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Kotabaru pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan demikian, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

